

MENUMBUHKAN CIVIC VALUES DIKALANGAN MAHASISWA: IKHTIAR MENANGKAL RADIKALISME

Biyanto¹

Abstract – This research discusses efforts to develop civic values spirit for college students. This is important to deter radicalist thought and act in education sphere, such as gangs fight, demonstration, anarchist action, and also the involvement of students in radical Islamic movement, like “Islamic Indonesian State”. As religion based on radical phenomenon occurs within society, it is important to agree upon diversity. Therefore, the civic culture should be strengthened, such as values of democracy, pluralism and multiculturalism, involving mass media, mass organization, and education institutions. Students are the most important element to be involved in developing civic culture movement. In high level education, college students could be a civic education agent to minimize potential radicalism by giving them comprehensive civic knowledge. Furthermore, the values are actuated into civic disposition action and mindset, as well as daily actuation of civic skills. The college students’ role is significantly important by referring to its historical facts, academic culture and an ability to build network. Unfortunately, nowadays, many students are trapped into practical politics and culturally trapped. While actually the cultural role of students can be effectively deter radicalism potential. The role of students is mediator of cross cultural and religion dialogue, formally and informally.

Keywords: civic values, students, terrorism, deradicalisation

Pendahuluan

Kebutuhan untuk menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan (*civic values*) terasa begitu mendesak. Hal itu dikarenakan kita hidup dalam suasana bangsa yang sangat majemuk. Dalam perspektif teori-teori sosial, kemajemukan masyarakat secara umum dapat dilihat dari perspektif horisontal seperti perbedaan agama, etnis, bahasa daerah, geografis, pakaian/makanan dan budaya material lainnya. Sementara dilihat dari perspektif vertikal, kemajemukan masyarakat diamati dari perbedaan tingkat pendidikan, ekonomi, pemukiman, pekerjaan, dan tingkat sosial budaya.² Dalam konteks ini, Indonesia dapat digolongkan sebagai negara yang sangat majemuk. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau terbesar di dunia hingga mencapai 17.667 pulau besar dan kecil. Meski dalam salah satu ikrar Sumpah Pemuda 1928 kita telah bersepakat untuk

¹Penulis adalah dosen dan Lektor Kepala pada Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya. Meraih gelar doktor (Dr.) bidang pemikiran Islam dari Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya.

²Usman Pelly dan Asih Menanti, *Teori-teori Sosial Budaya*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud, 1994), hlm. 68.

berbicara dalam satu bahasa nasional namun realitasnya masih terdapat 350 etnis, adat istiadat, tata cara sesuai dengan kondisi lingkungan tertentu.³

Jika tidak dikelola dengan baik, maka faktor kemajemukan itu sangat potensial menjadi sumber konflik di tengah-tengah masyarakat. Padahal kemajemukan masyarakat merupakan suatu keniscayaan. Dalam perspektif ajaran agama Islam juga ditegaskan bahwa kemajemukan (pluralitas) merupakan bagian dari skenario Allah (*sunnatullah*).⁴ Bahkan dikatakan bahwa jika Allah menghendaki, maka manusia itu akan dijadikan satu umat saja. Tetapi, hal itu tidak dilakukan karena Allah ingin menguji sekaligus memerintahkan manusia untuk berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan (*fastabiqul khairat*) di muka bumi.⁵ Dengan bersandar pada pernyataan Ilahi itu, maka seharusnya kita senantiasa berusaha untuk menunjukkan diri sebagai umat yang terbaik. Diantara kategori umat terbaik adalah mereka yang memiliki komitmen kuat untuk beramal sosial guna menjunjung nilai-nilai kemanusiaan tanpa membedakan latar belakang etnis, budaya, dan agama. Komitmen pada nilai-nilai kemanusiaan tersebut diharapkan dapat menjadi pilar penting dalam membangun kehidupan yang damai dan saling menghargai.

Meski setiap pribadi sejatinya memiliki perbedaan namun hal itu seharusnya tidak menghalangi dirinya untuk bekerjasama dengan yang lain. Namun keinginan yang bersifat ideal itu ternyata banyak yang tidak sejalan dengan realitas dalam kehidupan. Akibat perbedaan latar belakang etnis, budaya, dan agama, seseorang atau kelompok dapat terlibat dalam konflik horisontal sehingga melupakan nilai-nilai kemanusiaan. Yang memprihatinkan, dalam setiap konflik tersebut senantiasa disertai perilaku yang radikal. Ironisnya, fenomena radikalisme itu kini telah merambah dunia pendidikan. Fenomena tawuran antarpelajar dan demonstrasi anarkis yang melibatkan kalangan terdidik menunjukkan betapa radikalisme telah tumbuh subur di lembaga-lembaga pendidikan mulai tingkat dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi.

Tren radikalisme di dunia pendidikan juga ditunjukkan dalam kasus keterlibatan sejumlah pelajar tingkat sekolah menengah atas (SMA). Sejumlah aktivitas kerohanian di

³Usman Pelly, *Kualitas Masyarakat: Sebuah Studi Peranan Etnis dan Pendidikan dalam Keserasian Sosial* (Medan: Menteri Negara Lingkungan Hidup dan IKIP Medan, 1992), hlm. 66.

⁴Al-Qur'an, *al-Hujurat* (49): 13.

⁵Al-Qur'an, *al-Maidah* (5): 48.

sekolah tingkat menengah atas diduga kuat telah menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai radikalisme bagi pelajar. Sementara radikalisme yang terjadi di pendidikan tinggi ditunjukkan melalui keterlibatan mahasiswa dalam gerakan Islam radikal seperti Negara Islam Indonesia (NII). Dalam kasus NII ini tampak sekali ada usaha yang cukup sistematis dari jaringan radikalisme untuk melibatkan pelajar dan mahasiswa. Secara spesifik tulisan ini bertujuan untuk membahas kiat-kiat menumbuhkan *civic values* di kalangan mahasiswa sebagai usaha preventif untuk mencegah radikalisme.

Urgensi Pendidikan Civic

Sebagai bagian dari bangsa yang majemuk, kita telah menyaksikan begitu banyak konflik sosial berlatar belakang perbedaan etnis, budaya, serta agama dan paham keagamaan. Khusus konflik yang berlatar belakang agama dan paham keagamaan tampak sekali bahwa konflik berjenis ini terus mengalami peningkatan. Sebagai contoh kita menyaksikan konflik berdarah di Sampang, Madura, yang melibatkan penganut Syi'ah dan anti Syi'ah. Konflik sosial yang melibatkan penganut Ahmadiyah dan kelompok anti Ahmadiyah juga terjadi di beberapa daerah. Yang mutakhir, terjadi radikalisme bernuansa SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) di Sumbawa Besar, NTB, pada akhir Januari 2013. Dalam konflik sosial bernuansa agama itu kita seringkali melihat adanya perusakan aset, pengusiran, dan bahkan pembunuhan, yang melibatkan kelompok dari penganut agama dan paham keagamaan yang berbeda.

Beberapa kejadian tersebut menunjukkan betapa kita sebagai bangsa yang dikenal bangsa lain di dunia ini sangat berbudaya, ramah, dan beradab, ternyata belum menyiapkan diri dengan baik untuk hidup bersatu dalam perbedaan (*unity in diversity*). Nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara yang terangkum dalam bahasa Sansekerta; “Bhinneka Tunggal Ika”, dalam implementasinya masih jauh dari harapan. Dengan meminjam istilah A. Mukti Ali, mantan Menteri Agama Republik Indonesia dan Bapak Perbandingan Agama, dikatakan bahwa kita seharusnya berkomitmen untuk setuju dalam perbedaan (*agree in disagreement*).⁶ Pemikiran ini meniscayakan pada kita untuk memahami bahwa setiap agama dan paham keagamaan sejatinya memiliki perbedaan

⁶A. Mukti Ali, “Ilmu Perbandingan Agama: Dialog, Dakwah, dan Misi,” dalam Burhanuddin Daya dan Herman Leonard Beck (ed.), *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia dan Belanda*, (Jakarta: INIS, 1992), hlm. 226-229.

dan persamaan. Tugas kita adalah mencari lebih banyak persamaannya dan mencoba memahami pluralitas agama dan paham keagamaan. Karena itulah kita harus selalu menyadari bahwa pluralitas etnis, budaya, dan agama, merupakan keniscayaan.

Dalam kondisi masyarakat yang multi etnis, budaya, dan agama tersebut terasa sekali pentingnya usaha untuk menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan yang diantaranya terangkum dalam ajaran tentang demokrasi, pluralisme, dan multikulturalisme. Nilai-nilai kewarganegaraan inilah yang selanjutnya dinamakan dengan *civic values*. Itu berarti bahwa dalam konteks kehidupan masyarakat yang majemuk, *civic values* harus dijabarkan dalam praktek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Yang penting disadari bahwa dalam proses menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan ini, kita harus melibatkan seluruh elemen *civil society*, termasuk organisasi-organisasi sosial keagamaan (ormas), media massa, lembaga pendidikan dan mahasiswa, sebagai agen untuk mewujudkan tata kehidupan yang toleran dan inklusif di tengah-tengah masyarakat. Ormas penting dilibatkan karena memiliki jaringan yang luas dengan sumber daya manusia dan amal usaha yang sangat andal. Sementara kekuatan media massa untuk membangun opini publik sudah tidak perlu diragukan lagi. Dalam hal ini, ormas dan media massa dapat dimanfaatkan untuk mencerahkan pola pikir masyarakat agar tidak *jumud*, parsial, dan eksklusif.

Peran penting untuk membangun kehidupan masyarakat yang berbudaya juga dapat dilakukan perguruan tinggi, termasuk unsur mahasiswanya. Karena itu mahasiswa harus mendapat wawasan yang memadai agar dapat mengaplikasikan *civic values* dalam seluruh segi kehidupan. Berdasarkan pengalaman di lembaga pendidikan tinggi, penanaman nilai-nilai kewarganegaraan terhadap mahasiswa itu telah ditempuh melalui berbagai kegiatan di kampus. Misalnya kegiatan intrakurikuler yang dilakukan melalui pengajaran mata kuliah *Civic Education* (Pendidikan Kewarganegaraan). Pendidikan *civic* ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, yakni untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Mahaesa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.⁷ Tetapi kita semua mengetahui, praktek penanaman nilai-nilai *civic* sejauh ini belum menunjukkan hasil yang maksimal. Itu sangat

⁷Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

mungkin disebabkan kurangnya keteladanan dari civitas akademika perguruan tinggi, pejabat publik, dan tokoh-tokoh masyarakat, dalam mengimplementasikan nilai-nilai civic. Penyebab lainnya adalah pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran seringkali terlalu doktriner sehingga tidak terjadi internalisasi nilai-nilai kewarganegaraan bagi mahasiswa.

Pengajaran mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan ternyata bukan hanya monopoli perguruan tinggi di negara kita. Pengalaman di negara lain juga menunjukkan langkah serupa meski menggunakan nomenklatur mata kuliah yang berbeda seperti *Civic Education* (USA), *Citizenship Education* (Inggris), *Sachunterricht* (Jerman), *Obscevovedine* (Rusia), *Education Civicas* (Mexico), *Civics* (Australia), *Social Studies* (New Zealand), *Life Orientation* (Afrika Selatan), *People and Society* (Hungaria), *Civics and Moral Education* (Singapore), dan *Ta'limat Muwathanah* atau *Tarbiyatul Wathaniyah* (Timur Tengah).⁸ Jika kita cermati maka akan tampak bahwa meski menggunakan nama yang berbeda tetapi substansi yang ingin ditanamkan pada mahasiswa adalah nilai-nilai kewarganegaraan. Targetnya jelas agar di masa mendatang akan terbentuk generasi masa depan bangsa yang mencintai tanah air, patriotis, nasionalis, dan berkarakter kuat.

Praktek pengajaran materi pendidikan kewarganegaraan di negara kita diposisikan sebagai muatan wajib kurikulum mulai pendidikan tingkat dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi.⁹ Hal itu menunjukkan betapa sistematis *ikhtiar* pemerintah untuk menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan pada anak-anak bangsa. Pendidikan nilai-nilai kewarganegaraan ini seakan menemukan momentumnya karena secara bersamaan kita menyaksikan bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ada begitu banyak kasus radikalisme. Tren radikalisme saat ini juga disinyalir terus menguat. Ironisnya, radikalisme sosial itu banyak yang menggunakan simbol-simbol agama sebagai alat. Fenomena radikalisme sosial bernuansa agama diantaranya telah mewujud dalam berbagai gerakan terorisme yang marak terjadi di penjuru tanah air. Jika kita telaah lebih jauh maka dapat dikatakan bahwa salah satu elemen yang dijadikan sasaran gerakan terorisme adalah

⁸Udin S. Wirnataputra, *Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia*, (makalah seminar, tidak diterbitkan), Malang, 23 Juli 2008.

⁹Secara eksplisit kewajiban mengajarkan pendidikan kewarganegaraan untuk peserta didik tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi diundangkan dalam pasal 37 ayat 1 dan pasal 38 ayat 2 UU Sisdiknas.

kaum muda. Itu dapat diamati dari beberapa kasus terorisme dan radikalisme yang melibatkan kelompok pelajar dan mahasiswa.

Disamping radikalisme bernuansa agama, kita juga melihat ada banyak kasus radikalisme yang dilakukan kaum terpelajar seperti tawuran dan demonstrasi anarkistis. Yang menyedihkan dalam berbagai kasus radikalisme yang melibatkan kelompok terpelajar itu senantiasa berujung pada perusakan fasilitas pendidikan dan korban jiwa. Radikalisme jenis ini jelas harus diwaspadai karena terjadi di lembaga pendidikan dan dilakukan kalangan yang terpelajar. Fenomena radikalisme yang melibatkan kaum terpelajar ini menunjukkan bahwa ada yang salah dalam sistem pendidikan kita. Karena itulah pelibatan civitas akademika perguruan tinggi, utamanya mahasiswa, dalam program deradikalisasi menjadi suatu keniscayaan. Dalam kaitan inilah mahasiswa dapat dijadikan agen untuk meminimalkan gejala radikalisme.

Jika kita ingin melibatkan mahasiswa dalam menangkal radikalisme, maka yang perlu dilakukan adalah memberikan pemahaman yang utuh mengenai nilai-nilai kewarganegaraan (*civic knowledge*). Bahkan tidak hanya berhenti pada pengetahuan, kita juga harus mengawal agar pemahaman yang baik tersebut teraktualisasikan dalam bentuk sikap dan watak (*civic disposition*) dan perilaku keseharian (*civic skill*). Untuk mencapai tujuan tersebut tentu dibutuhkan “gerakan” seluruh civitas akademika mulai pimpinan perguruan tinggi, dosen, karyawan, dan mahasiswa. Yang juga penting ditekankan dalam kaitan dengan fenomena radikalisme yang melibatkan kaum terpelajar ini adalah faktor keteladanan. Keteladanan ini mutlak diwujudkan untuk membangun budaya yang berkeadaban (*civilized*). Fenomena radikalisme yang melibatkan kalangan perguruan tinggi rasanya disebabkan mereka tidak lagi menemukan sosok yang dapat dijadikan teladan dalam kehidupan di kampus.

Dengan mengajarkan nilai-nilai kewarganegaraan mulai *civic knowledge*, *civic disposition*, dan *civic skill* maka kita layak berharap akan terlahir individu-individu yang berkarakter keindonesiaan dengan bersandar pada ajaran agama. Hal ini penting ditekankan karena pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian yang integral dari ide, instrumentasi, dan praksis kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Tetapi harus diakui bahwa mengajarkan pendidikan kewarganegaraan saat ini bukan perkara yang mudah. Itu karena telah sekian lama praktek kehidupan berbangsa

dan bernegara terasa jauh dari nilai-nilai luhur Pancasila. Praktek kehidupan yang menyeleweng jauh dari nilai-nilai Pancasila itu menjadi beban yang terasa berat bagi para pendidik. Karena itu para pendidik harus menemukan metode dan pendekatan yang lebih manusiawi agar nilai-nilai kewarganegaraan dapat ditransformasikan pada peserta didik.

Mahasiswa Sebagai Agen

Fakta sejarah menunjukkan kepada kita bahwa kaum muda yang terdidik, termasuk mahasiswa, selalu berperan aktif dalam berbagai peristiwa yang menentukan perjalanan bangsa. Bahkan melalui teori siklus 20 tahunan, kita menyaksikan bahwa kiprah kaum muda dalam sejarah pembangunan bangsa begitu menonjol.¹⁰ Hal itu dapat diamati melalui beberapa peristiwa bersejarah yang menunjukkan peran penting kaum muda sebagai pendorong perubahan. Siklus 20 tahunan dapat diamati mulai era kebangkitan nasional (1908), sumpah pemuda (1928), proklamasi kemerdekaan (1945), pergerakan mahasiswa (1966), dan reformasi (1998). Meski baru menunjukkan hasil pada 1998, kiprah kaum muda yang mengkritik berbagai kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat sejatinya telah dimulai sejak pertengahan 1980-an. Saat itu, kaum muda yang direpresentasikan oleh kekuatan mahasiswa seakan tidak pernah lelah untuk memberikan koreksi dan kritik tajam terhadap rezim orde baru. Era reformasi yang kemudian menggantikan orde baru dalam konteks ini dapat dikatakan sebagai akumulasi dari berbagai koreksi dan kritik tersebut.

Kiprah kaum muda yang tergambar dalam siklus 20 tahunan menunjukkan bahwa mereka sesungguhnya memiliki kultur keilmuan serta keterampilan berorganisasi dan membangun jaringan yang sangat hebat. Tetapi sangat disayangkan, kultur tersebut seakan tenggelam dalam hiruk pikuk politik sepanjang era reformasi. Bahkan kita menyaksikan adanya penguatan ketertarikan politik di kalangan kaum muda. Kaum muda masa kini cenderung lebih menunjukkan minat dalam bidang politik dengan menjadi aktivis partai, anggota legislatif, dan tim sukses dalam pemilihan kepala daerah. Sementara kiprah kaum muda yang bergerak melalui jalur kultural terasa sekali kurang mendapat tempat. Itu dapat diamati dari minimnya prestasi kaum muda di even olimpiade

¹⁰M. Dawam Rahardjo, *Intelektual Intelligensia dan Perilaku Politik Bangsa: Risalah Cendekiawan Muslim* (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 43 dan 84.

internasional, hibah penelitian, dan penemuan-penemuan yang bersifat terapan (*applied research*). Apresiasi pemerintah terhadap capaian kaum muda yang bergerak di ranah kultural juga terasa masih sangat kurang.

Keterlibatan kaum muda dalam aktivitas politik menemukan momentum yang tepat seiring dengan kebijakan multi partai. Bahkan dinamika politik lokal di daerah juga memberikan ruang yang terbuka bagi kaum muda untuk berkiprah di jalur politik. Karena itu tidak berlebihan jika dikatakan bahwa saat ini telah terjadi peningkatan “syahwat politik” di kalangan kaum muda. Peningkatan “syahwat politik” ini tidak hanya terjadi di daerah, melainkan juga dalam skala nasional. Di antara indikatornya adalah bergabungnya sebagian intelektual muda dalam kepengurusan partai politik. Padahal mereka sebelumnya dikenal sebagai intelektual muda yang independen. Elit partai pun seakan berlomba untuk mengajak kaum muda dengan memberikan sejumlah jabatan penting. Targetnya adalah mereka dapat dijadikan sumber energi untuk menarik pemilih pemula.

Sebagai konsekuensi adanya peningkatan “syahwat politik” kaum muda maka kiprah dan perjuangan mereka pun banyak disalurkan melalui berbagai aktivitas politik. Fenomena ini jelas menunjukkan bahwa sebagian kaum muda telah tergoda dengan kehidupan politik yang dianggap lebih menjanjikan masa depan. Akibatnya, kultur keilmuan dan daya kritis yang semestinya menjadi ruh perjuangan kaum muda terus tergerus. Yang terjadi kemudian adalah budaya loyal pada pimpinan partai. Karena itu dalam tingkat tertentu dapat dikatakan bahwa tiada lagi idealisme perjuangan yang menyemangati aktivitas kaum muda. Peningkatan *interest* politik kaum muda juga memunculkan kultur mudah berpecah sebagai konsekuensi dari perbedaan pilihan politik. Akibatnya perjuangan kaum muda pun tidak lagi didasarkan pada kepentingan jangka panjang, melainkan untuk tujuan pragmatis-jangka pendek.

Pilihan sebagian kaum muda untuk berkiprah melalui jalur politik mengakibatkan capaian perjuangan melalui jalur kultural tidak terlalu menonjol. Padahal kalau kita menengok ke belakang, kita pasti akan menemukan figur-figur penting dari kalangan mahasiswa yang memiliki pengaruh hebat dalam dunia pergerakan. Salah satunya adalah Ahmad Wahib, anak muda yang bergulat dalam pencarian jati diri, yang kemudian

melahirkan karya melegenda.¹¹ Juga Nurcholish Madjid yang pernah menggagas "Islam Yes, Partai Islam No", sebagai bagian dari cita-cita besarnya untuk menyegarkan paham keagamaan umat Islam.¹² Spirit perjuangan yang digelorakan Ahmad Wahib dan Nurcholish Madjid pun terasa kalah dibanding kepentingan-kepentingan politik kekuasaan.

Pilihan sebagian kaum muda untuk berkiprah di ranah politik jelas merupakan hak yang paling asasi. Karena itu, pilihan mereka untuk menjadi aktivis partai harus dipandang sebagai hak politiknya. Tetapi, persoalan akan muncul jika pilihan kaum muda yang berkiprah di bidang politik praktis menjadi yang terutama (*mainstream*). Sebab, dalam kondisi seperti ini perjalanan kaum muda akan selalu diwarnai intrik dan tarik menarik kepentingan politik. Akibatnya, akan terjadi peningkatan mobilisasi sumber daya kaum muda untuk kepentingan politik praktis. Jika kondisi ini yang terjadi maka kekuatan kaum muda pasti akan terbelah dalam beberapa faksi politik.

Menyikapi berbagai pilihan tersebut, maka tidak seharusnya seluruh energi kaum muda dihabiskan untuk berkiprah melalui jalur politik. Harus ada komitmen sebagian dari mereka untuk tetap berkiprah di jalur kultural sebagai intelektual, peneliti, dan pekerja sosial lainnya. Pada konteks inilah kita merasa perlu mengajak mahasiswa memberikan kontribusi melalui berbagai gerakan kultural untuk menangkal gejala radikalisme, baik yang berbasis keagamaan maupun non-keagamaan. Apalagi tren menunjukkan bahwa kelompok-kelompok radikal di tanah air telah menjadikan kaum muda sebagai sasaran. Mereka pun menyasar pendidikan tinggi untuk merayu kaum muda agar mau diajak berjuang. Hampir pasti dalam proses rekrutmen itu, pendekatan teologis-normatif digunakan untuk memberikan keyakinan pada kaum muda. Apalagi dalam indoktrinasi itu kelompok radikal mampu meyakinkan pada kaum muda bahwa pilihan menempuh jalan radikal sejalan dengan ajaran jihad dalam agama. Jika kaum muda terbuai dengan ajaran tersebut maka hal itu akan sangat strategis untuk melanjutkan perjuangan ideologi kelompok radikal.

¹¹Johan Effendi dan Ismed Natsir (Peny.), *Pergolakan Pemikiran Islam: Catatan Harian Ahmad Wahib*, (Jakarta: LP3ES dan Freedom Institute, 2003), hlm. 12.

¹²Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 239-256.

Ideologi Radikalisme Keagamaan

Setiap gerakan pasti memiliki ideologi yang hendak dijadikan nilai-nilai dasar dalam berjuang. Menurut Blumer, ideologi itu berkaitan dengan banyak aspek. Di dalam ideologi terdapat seperangkat kritik terhadap tatanan yang ada yang ingin diubahnya. Ideologi juga berkaitan dengan doktrin untuk membenarkan tujuan yang ingin dicapai.¹³ Dengan kata lain, ideologi pasti akan dapat melahirkan nilai, keyakinan, kritik, alasan, dan pembelaan yang kuat tertanam dalam diri pengikutnya. Berdasarkan ideologi itulah akan ditentukan orientasi perjuangan dan tahapan untuk mencapai tujuan.

Dalam gerakan praksis keagamaan, ideologi telah dijadikan arahan, justifikasi, senjata, serta untuk mempertahankan inspirasi dan harapan. Sebagai manifestasi gerakan sosial keagamaan yang bercorak radikal, gerakan terorisme juga memiliki ideologi yang senantiasa diperjuangkan. Pada konteks inilah perhatian kita harus diarahkan untuk mencermati ideologi yang diperjuangkan gerakan terorisme. Ini penting karena terorisme terus menunjukkan perkembangan dengan merekrut pengikut baru dari kalangan muda yang terpelajar. Kasus NII yang berhasil masuk kampus dan merekrut sejumlah mahasiswa lintas perguruan tinggi dapat dijadikan fenomena yang patut diwaspadai.

Jaringan terorisme di Solo dan beberapa daerah yang lain juga telah menunjukkan betapa kaum muda telah menjadi sasaran indoktrinasi gerakan radikal. Kaum muda dijadikan sasaran kelompok terorisme karena dianggap masih labil dan sedang mencari jati diri sehingga berpotensi untuk dijadikan kader. Melalui para pemuda inilah ideologi terorisme terus disemai sehingga gerakan terorisme terasa sulit dilumpuhkan. Bahkan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Marciano Norman, pernah mengatakan bahwa aksi terorisme di Indonesia belum berakhir.¹⁴ Pernyataan ini mutlak benar karena aksi terorisme memang tidak akan pernah berakhir sepanjang ideologi gerakannya tidak diperangi.

Karena terorisme terus bermetamorfosis maka yang perlu dilakukan adalah melawan ideologinya. Ikhtiar ini harus melibatkan seluruh elemen *civil society*, termasuk perguruan tinggi dengan seluruh sumber dayanya. Yang perlu ditekankan bahwa ikhtiar

¹³Herbert Blumer, "Social Movement," dalam Alfred McClung Lee (ed.), *Principles of Sociology*, (New York: Barnes & Noble, 1966), hlm. 210-211.

¹⁴Biyanto, "Memerangi Ideologi Terorisme," *Seputar Indonesia*, 12 September 2012, hlm. 4.

ini harus dilakukan tanpa kenal lelah. Sebagai langkah awal, usaha melawan ideologi terorisme harus dimulai dengan memahami faktor yang menyebabkan kemunculannya. Disamping itu perlu juga dipahami karakter gerakan terorisme. Hal ini jelas bukan pekerjaan mudah karena terorisme telah menjadi fenomena sosial keagamaan yang berakar kuat di kalangan pengikutnya.

Mengenai faktor munculnya terorisme dapat dijelaskan dengan tiga teori. *Pertama*, melalui teori struktural yang mengaitkan terorisme dengan sebab-sebab yang bersifat eksternal seperti politik, sosial, budaya, dan ekonomi. *Kedua*, melalui teori psikologi yang menjelaskan motivasi seseorang hingga tertarik untuk bergabung dengan organisasi teroris. Bahkan dengan motivasi yang tinggi itu mereka merelakan diri jika harus ditunjuk sebagai “pengantin” untuk melakukan bom bunuh diri. *Ketiga*, melalui teori pilihan rasional yang menjelaskan adanya kalkulasi untung rugi yang dijadikan pertimbangan pelaku terorisme.

Penjelasan teori struktural mengaitkan latar belakang terorisme dengan dua faktor. *Pertama*, faktor prakondisi, berupa penyebab tidak langsung gerakan terorisme. Faktor ini berupa akumulasi kekecewaan kelompok teroris, terutama yang berkaitan dengan kegagalan dalam merealisasikan cita-cita politik Islam. Penjelasan ini dapat dipahami karena gerakan keagamaan yang bercorak radikal selalu disertai agenda di bidang politik.

Watak politik gerakan radikal dapat diamati melalui perjuangan tokoh-tokohnya dalam konteks kekuasaan seperti keinginan mendirikan negara Islam, formalisasi syari’ah, serta memahami agama dan politik sebagai satu kesatuan. Pemahaman yang menekankan totalitas ajaran Islam dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk politik, begitu kuat dalam alam pemikiran kelompok radikal. Hanya saja, cita-cita politik ini baru sebatas imajinasi karena belum pernah berhasil untuk diwujudkan. Karena itulah Oliver Roy menyebut bahwa cita-cita kelompok Islam politik ini sebagai *Islamic political imagination* (imajinasi politik Islam). Oliver Roy mencontohkan beberapa organisasi yang berpaham radikal dan kemudian gagal merealisasikan perjuangannya seperti Ikhwan al-Muslimin di Mesir dan Jama’at-i Islami di Indo-Pakistan.¹⁵ Melalui tokoh-tokohnya seperti

¹⁵Oliver Roy, *The Failure of Political Islam*, (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1994), hlm. 12 dan 75.

Hasan al-Banna dan Abu al-A'la al-Maududi (1903-1983), dua organisasi tersebut telah mencoba mendefinisikan Islam sebagai sistem politik (ideologi) tatkala berhadapan dengan ideologi-ideologi besar yang muncul pada abad XX.

Contoh lain yang juga layak disebut adalah Hizb al-Tahrir al-Islami yang didirikan Taqi al-Din al-Nabhani (wafat, 1977) di Jerusalem pada 1953. Gerakan ini secara eksplisit mendeklarasikan diri sebagai partai politik dengan menjadikan Islam sebagai ideologinya. Gerakan ini tergolong radikal dan reaksioner karena menjadikan jihad sebagai strategi perjuangan untuk mencapai tujuan. Menurut gerakan ini, semua negara di dunia belum menerapkan syari'at Islam. Karena itu dapat dimasukkan dalam kategori *dar al-kufr*, meskipun penduduknya Muslim. Gerakan ini pun menawarkan kekhilafahan sebagai solusi terhadap berbagai persoalan umat.¹⁶ Karena sifatnya yang radikal dan reaksioner itu Hizb al-Tahrir al-Islami termasuk organisasi yang dilarang di negara kelahirannya. Anehnya, di negara kita Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) justru berkembang dengan sangat pesat.

Kedua, faktor pemercepat (*triggering factor*), yaitu pemicu langsung gerakan terorisme. Termasuk dalam faktor pemicu adalah ketidakadilan sosial ekonomi, tiadanya penegakan hukum (*law enforcement*), tersumbatnya partisipasi politik sehingga masyarakat mengalami tuna kuasa (*powerless*), dan tersedianya persenjataan. Sementara teori psikologi menjelaskan aspek kejiwaan pelaku teroris, mulai dari saat rekrutmen, identitas diri, kepribadian, penanaman ideologi, dan motivasi anggotanya. Melalui penjelasan psikologi dapat diketahui latar belakang sosial pelaku teroris. Misalnya, ditemukan fakta di lapangan bahwa pelaku terorisme adalah mereka yang mengalami keterasingan sosial dan kesulitan ekonomi.

Sedangkan teori pilihan rasional menjelaskan bahwa terorisme dilakukan dengan pertimbangan untung rugi. Melalui teori ini diperoleh penjelasan mengenai faktor *cost and benefit* yang menjadi pertimbangan pelaku. Misalnya, ditemukan fakta bahwa pelaku bom bunuh diri adalah mereka yang secara ekonomi kurang mampu. Fakta ini menunjukkan sesungguhnya ada alasan yang bersifat ekonomis dibalik keberanian mereka melakukan teror. Karena itulah maka menjadi penting telaah yang bersifat komprehensif itu dilakukan terhadap setiap pelaku gerakan terorisme.

¹⁶Nazih Ayubi, *Political Islam: Religion and Politics in the Arab World*, (London and New York: Routledge, 1991), hlm. 96-97.

Ada juga individu yang tergoda masuk jaringan terorisme dengan pertimbangan keagamaan. Dengan masuk menjadi anggota teroris mereka berpeluang untuk berjihad, berharap mati syahid dan kemudian masuk surga. Spirit keagamaan ini terbangun berdasarkan pemahaman yang parsial terhadap ajaran Islam mengenai jihad. Padahal jihad tidak hanya berkaitan dengan perjuangan fisik. Bahkan Buya Sutan Mansur, ulama kharismatik asal Sumatera Barat, pernah memaknai jihad dengan “bekerja sepenuh hati.”¹⁷ Pemaknaan ini menarik karena sama sekali tidak menyinggung kata perang dan bentuk-bentuk jihad secara fisik lainnya.

Mengenai karakter ideologi gerakan radikal, Hrair Dekmejian menjelaskan bahwa gerakan ini memiliki tiga sifat, yaitu; merata (*pervasiveness*), memiliki banyak pusat (*polycentrism*), dan berjuang terus-menerus (*persistence*).¹⁸ Karakter pertama menunjukkan bahwa fenomena gerakan sosial keagamaan yang radikal dan reaksioner sejatinya terjadi merata di hampir seluruh dunia. Gerakan ini umumnya juga menonjolkan aspek simbolik dari ajaran agama. Karena itu tidak berlebihan jika dikatakan bahwa jaringan terorisme ini bersifat lintas negara (*trans-nasional*). Isu yang senantiasa diwacanakan juga bersifat global. Beberapa ormas di negeri ini rasanya banyak yang menunjukkan karakter trans-nasional.

Karakter kedua, *polycentrism*, ditunjukkan melalui banyaknya organisasi sosial keagamaan yang bercorak radikal. Aktivitas gerakan keagamaan berkarakter radikal ini dilakukan banyak organisasi. Setiap organisasi memiliki pemimpin, program, strategi, dan taktik yang berbeda. Unikny setiap gerakan ini tidak saling berhubungan. Meski begitu jika ditelisik lebih jauh maka terasa sekali bahwa organisasi-organisasi tersebut memiliki kesamaan agenda. Salah satunya adalah mewujudkan negara Islam sebagai negara ideologis yang domainnya mencakup seluruh aspek kehidupan.¹⁹ Dengan menempatkan Islam sebagai ideologi maka harus dijadikan dasar membuat kebijakan di bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya.

¹⁷M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2002), hlm. 522.

¹⁸R. Hrair Dekmejian, “The Anatomy of Islamic Revival: Legitimacy Crisis Ethnic, Conflict, and The Search of Islamic Alternatives,” *The Middle East Journal*, Vol.34, No.1, 1980, hlm. 1-3.

¹⁹R. Hrair Dekmejian, “Islamic Revival: Catalysts, Categories, and Consequences,” dalam Shireen T. Hunter (ed.), *The Politics of Islamic Revivalism: Diversity and Unity*, (Bloomington: Indiana University Press, 1988), hlm. 4-5.

Karakter ketiga, *persistence*, berarti bahwa gerakan radikal akan bergerak terus-menerus, pantang menyerah, dan berani mengambil resiko apa pun asal tujuan tercapai. Dengan karakter ini maka tokoh terorisme diharuskan merekrut kader yang akan melanjutkan perjuangannya. Melalui cara ini ideologi terorisme terus ditanamkan sehingga mengakar kuat dalam diri pengikutnya.

Ikhtiar Menangkal Radikalisme

Berkaitan dengan ikhtiar untuk menangkai ideologi kelompok radikal dan reaksioner maka yang harus dilakukan adalah tidak memberikan kesempatan (*window of opportunity*) terhadap munculnya tindakan radikal. Keinginan ini akan tercapai jika faktor-faktor yang menjadi pemicu radikalisme dapat diminimalkan. Termasuk dalam kategori faktor pemicu adalah ketidakadilan sosial, ekonomi, hukum, politik, dan kepentingan elit.

Dalam kaitan ini penanganan kasus korupsi, terutama yang menjadi perhatian publik, harus segera diselesaikan oleh aparat penegak hukum dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan. Sebab, jika ini tidak dilakukan maka persoalan ketidakadilan dalam penanganan korupsi juga sangat berpotensi untuk memicu aksi kelompok radikal. Hal ini penting dijadikan atensi pemerintah dan elit politik agar bahaya laten radikalisme dan terorisme dapat dicegah.

Mahasiswa sebagai bagian dari kekuatan *civil society* yang telah terbukti kiprahnya dalam sejarah perjalanan bangsa jelas memiliki posisi yang sangat penting. Mahasiswa dapat menjadi kekuatan moral untuk mendesak pemerintah agar bersungguh-sungguh untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Kegagalan pemerintah dan elit politik dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsa ini sangat berpotensi melahirkan militansi di kalangan pelaku radikalisme.

Disamping itu, mahasiswa juga dapat mengambil peran dengan terus mewacanakan tema-tema yang berkaitan dengan nilai-nilai kewarganegaraan. Tema-tema seputar demokrasi, pluralisme, dan multikulturalisme, harus terus disemai di kalangan mahasiswa. Tidak diragukan lagi, nilai-nilai demokrasi yang kini tumbuh subur di negara-negara maju merupakan gagasan yang sejalan dengan prinsip musyawarah (*syura*) dalam

Islam.²⁰ Bahwa masih ditemukan praktek demokrasi yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar dalam Islam itu semua harus ditempatkan sebagai tantangan. Tugas kita adalah mengawal agar demokrasi tidak sebatas dipahami secara prosedural. Sebab, yang jauh lebih penting adalah nilai-nilai substantif yang terkandung dalam ajaran demokrasi itu sendiri.

Wacana untuk menumbuhkan nilai-nilai pluralisme dan multikulturalisme juga mutlak dilakukan. Dalam hal ini pluralisme tidak harus dipahami sebagai paham yang mengajarkan semua agama sama, sebagaimana yang dipahami Majelis Ulama Indonesia (MUI).²¹ Definisi yang dikemukakan MUI itu hanya satu dari sekian pengertian akademik mengenai pluralisme. Menurut Diana L. Eck, pluralisme itu berbeda dengan diversitas, toleransi pasif, dan relativisme. Pluralisme mengajarkan dialog lintas budaya dan agama. Pluralisme juga mengharuskan agar pihak yang terlibat dialog berkomitmen untuk melakukan *sharing* dan terbuka untuk dikritik.²² Pada konteks inilah dialog lintas agama yang bercorak normatif-teologis sedikit demi sedikit harus digeser menjadi dialog kemanusiaan sehingga hubungan antarpribadi dan antarumat beragama dapat mencair. Pada tataran kemanusiaan inilah titik temu penganut agama dan paham keagamaan sangat mungkin akan terjadi seperti dalam persoalan kemiskinan, kebodohan, pemberantasan korupsi, dan penegakan integritas publik.

Sementara itu, multikulturalisme harus diartikan sebagai bentuk pengakuan terhadap pluralitas budaya yang menumbuhkan kepedulian untuk mengupayakan agar kelompok minoritas terintegrasi dalam masyarakat dan kelompok mayoritas mau mengakomodasi perbedaan kelompok minoritas agar kekhasan identitas mereka tetap diakui. Arah multikulturalisme adalah untuk menciptakan, menjamin, dan mendorong ruang publik sehingga memungkinkan beragam komunitas dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kekhasan masing-masing.²³ Jika dipahami dengan baik,

²⁰A. Ubaidillah dan Abdul Rozak (Peny.), *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) untuk Perguruan Tinggi* (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006), hlm. 157-161.

²¹Baca keputusan MUI tentang sesatnya sekularisme, pluralisme, dan liberalisme hasil dari Musyawarah Nasional pada 29 Juli 2005. Lihat juga, Budhi Handriyanto, *50 Tokoh Islam Liberal Indonesia: Pengusung Ide Sekularisme, Pluralisme, dan Liberalisme Agama*, (Jakarta: Hujjah Press, 2007), hlm. xli-xlii.

²²Diana L. Eck, "What is Pluralism," *Nieman Report God in the Newsroom Issues*, Vol. XLVII, No. 2, Summer, 1993, hlm. 1.

²³A. Ubaidillah dan Abdul Rozak (Peny.), *op.cit.*, hlm. 117-124.

multikulturalisme dapat menjadi solusi dari gejala radikalisme berlatar belakang perbedaan etnis, budaya, dan agama.

Rasanya mahasiswa harus mengambil peran dengan menjadi mediator bagi dialog-dialog lintas budaya dan agama untuk tujuan-tujuan kemanusiaan. Dialog dalam hal ini tidak harus dipahami secara formal, melainkan dialog informal misalnya melalui pentas seni, permainan teater, musik, olah raga, dan bakti sosial. Melalui pertemuan-pertemuan informal inilah orang akan cenderung melupakan status sosial, budaya, etnis, ideologi, dan agama, yang dalam situasi formal dapat menjadi jarak yang membedakan antar individu. Tugas mahasiswa kini adalah memperbanyak pertemuan informal untuk mengurangi prasangka (*prejudice*) antar individu dan kelompok.

Penutup

Dengan pemahaman yang baik mengenai nilai-nilai kewarganegaraan maka mahasiswa dapat terhindar dari sikap dan pandangan yang radikal, militan, berpikiran sempit (*narrow minded*), serta bersemangat yang berlebihan (*ultra zealous*) atau cenderung ingin mencapai tujuan dengan memakai cara-cara kekerasan. Pada konteks inilah nilai-nilai kewarganegaraan harus terus diwacanakan agar pada saatnya kita melihat perubahan sikap dan perilaku dalam diri mahasiswa sehingga menjadi komponen strategis untuk menumbuhkan budaya kewarganegaraan (*civic culture*). Ikhtiar ini harus disadari merupakan investasi jangka panjang. Karena itu hasilnya pasti tidak akan bersifat instan dan terwujud dalam waktu yang singkat.

Persoalannya tinggal pada strategi yang digunakan. Misalnya, apakah nilai-nilai *civic* itu akan dilembagakan dalam struktur kurikulum perguruan tinggi atau disisipkan (*inserting*) dalam mata-mata kuliah yang telah ada. Tetapi, jika melihat struktur kurikulum yang sudah demikian gemuk rasanya strategi *inserting* akan lebih relevan. Selain ikhtiar melalui pembelajaran ekstrakurikuler dan intrakurikuler, persoalan keteladanan civitas akademika perguruan tinggi harus dijadikan perhatian. Jika keteladanan berhasil diwujudkan maka mahasiswa pasti akan menemukan sosok yang patut diteladani dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan cara ini rasanya harapan kita untuk melihat peran strategis mahasiswa dalam menangkal radikalisme akan menjadi

kenyataan. Rasanya kita bersepakat dengan kata-kata hikmah (*al-mahfudzat*) yang mengatakan bahwa pemuda masa kini adalah pemimpin masa yang akan datang.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an dan Terjemahnya. 1990. Jakarta: Departemen Agama.
- Ali, A. Mukti. 1992. "Ilmu Perbandingan Agama: Dialog, Dakwah, dan Misi," dalam Burhanuddin Daya dan Herman Leonard Beck. (ed.). *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia dan Belanda*. Jakarta: INIS.
- Ayubi, Nazih. 1991. *Political Islam: Religion and Politics in the Arab World*. London and New York: Routledge.
- Biyanto. 12 September 2012. "Memerangi Ideologi Terorisme." *Seputar Indonesia*.
- Blumer, Herbert. 1966. "Social Movement," dalam Alfred McClung Lee (ed.), *Principles of Sociology*, New York: Barnes & Noble.
- Dekmeijan, R. Hrair. 1988. "Islamic Revival: Catalysts, Categories, and Consequences", dalam Shireen T. Hunter (ed.). *The Politics of Islamic Revivalism: Diversity and Unity*. Bloomington: Indiana University Press.
- , 1980. "The Anatomy of Islamic Revival: Legitimacy Crisis Ethnic, Conflict, and The Search of Islamic Alternatives." *The Middle East Journal*, Vol.34. No.1.
- Eck, Diana L. Summer, 1993. "What is Pluralism," *Nieman Report God in the Newsroom Issues*, Vol. XLVII, No. 2.
- Effendi, Johan dan Ismed Natsir (Peny.). 2003. *Pergolakan Pemikiran Islam: Catatan Harian Ahmad Wahib*. Jakarta: LP3ES dan Freedom Institute.
- Handriyanto, Budhi. 2007. *50 Tokoh Islam Liberal Indonesia: Pengusung Ide Sekularisme, Pluralisme, dan Liberalisme Agama*. Jakarta: Hujjah Press.
- Madjid, Nurcholish. 1993. *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan.
- Pelly, Usman dan Asih Menanti. 1994. *Teori-teori Sosial Budaya*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud.
- , 1992. *Kualitas Masyarakat: Sebuah Studi Peranan Etnis dan Pendidikan dalam Keserasian Sosial*. Medan: Menteri Negara Lingkungan Hidup dan IKIP Medan.
- Rahardjo, M. Dawam. *Ensiklopedi al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 2002.
- Rahardjo, M. Dawam. 1993. *Intelektual Inteligensia dan Perilaku Politik Bangsa: Risalah Cendekiawan Muslim*. Bandung: Mizan.
- Roy, Oliver. 1994. *The Failure of Political Islam*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2006. *Himpunan Perundang-Undangan Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Ubaidillah dan Abdul Rozak (Peny.). 2006. *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Wiranataputra, Udin S. 23 Juli 2008. *Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia*. Malang: Makalah Seminar Tidak Diterbitkan.

